

**PENYUSUNAN INVENTARISASI
KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2020**



DISUSUN OLEH :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
CV. DAMAR KUMALA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pendahuluan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora ini tanpa suatu kendala yang berarti. Laporan Pendahuluan merupakan bagian dari penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Secara garis besar Laporan Pendahuluan ini berisikan bab-bab yang mengulas tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan, metodologi, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Semoga Laporan Pendahuluan ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan pekerjaan ini dalam menentukan langkah-langkah untuk menyusun laporan selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam terwujudnya laporan ini. Saran dan tanggapan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan yang kami buat.

Semarang, Juli 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	2
1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.4 Standar Teknis dan Landasan Hukum.....	4
1.4.1 Standar Teknis.....	4
1.4.2 Landasan Hukum.....	4
1.5 Keluaran.....	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
Bab 2 Tanggapan KAK.....	7
2.1 Latar Belakang.....	7
2.2 Maksud dan Tujuan	8
2.3 Sasaran.....	9
2.4 Sumber Pendanaan.....	9
2.5 Lokasi.....	10
2.6 Standar Teknis.....	10
2.7 Dasar Hukum	10
2.8 Lingkup Pekerjaan	11
2.9 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan	14
2.10 Kebutuhan Tenaga Ahli	14

2.11	Sistematika Laporan	15
Bab 3	Metodologi.....	18
3.1	Pendekatan dan Metodologi Penelitian.....	18
3.2	Kebutuhan Data.....	19
3.3	Metodologi Pengambilan Data	26
3.3.1	Teknik Pengumpulan Data	26
3.3.3	Mekanisme Pengumpulan Data	27
3.4	Teknik Analisis	28
Bab 4	Organisasi Dan Jadwal Pelaksanaan.....	32
4.1	Umum.....	32
4.2	Tenaga Ahli yang Ditugaskan	32
4.3	Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan	33
4.4	Jenis Kegiatan	34
4.5	Jadwal Kegiatan	34
DAFTAR PUSTAKA.....		37

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Kriteria Kawasan Lindung	20
Tabel 4. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	35
Tabel 4. 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	36

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	29
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Proses Pikir Pengukuran Dan Analisis Alokasi Kawasan Lindung	31
Gambar 4. 1 Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Penyusun Inventarisasi Kawasan Lindung	34

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantan berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dan kawasan rawan bencana alam. Keberadaan kawasan lindung saat ini telah terancam dengan pembangunan yang terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya pengelolaan terhadap kawasan lindung harus dilakukan seiring dengan pembangunan pada suatu daerah.

Salah satunya yaitu di daerah Kabupaten Blora dimana pembangunan terus meningkat. Pembangunan yang dilakukan tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberadaan kawasan lindung, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pembangunan daerah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Diperlukan perencanaan yang mendukung keberadaan ekosistem, agar fungsi ekosistem tidak mengalami degradasi. Kawasan lindung merupakan kawasan yang harus dijaga salah satunya dari segi luasnya. Kawasan lindung di Kabupaten Blora telah dikelola dengan baik. Tetapi diperlukan langkah-langkah yang dapat mempertahankan kondisi yang ada saat ini.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan data mengenai kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Blora. Data kawasan lindung tersebut berupa dokumen inventarisasi kawasan lindung yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, sehingga keseimbangan ekosistem dan kondisi lingkungan tetap terjaga dengan baik. Inventarisasi kawasan lindung Kabupaten Blora harus dilakukan sesuai dengan kondisi eksisting Kabupaten Blora saat ini.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah menghasilkan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan lindung yang efisien dan berkelanjutan.

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora adalah melakukan inventarisasi kawasan lindung di Kabupaten Blora sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan agar kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan lindung tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan lingkungan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kegiatan.

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora adalah wilayah administrasi Kabupaten Blora yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.821,59 km². Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

Utara	: Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati
Timur	: Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur)
Selatan	: Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)
Barat	: Kabupaten Grobogan

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora ini meliputi :

a. Persiapan

1. Membuat program kerja kegiatan secara keseluruhan;
2. Mempersiapkan administrasi;
3. Menetapkan metode survei dan kelengkapan survei;
4. Menyusun jadwal kerja dan kegiatan persiapan lain yang dibutuhkan;
5. Melakukan studi literatur

b. Pengumpulan Data

1. Melakukan pengumpulan data sekunder yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya dan isu-isu perencanaan, serta pengumpulan peta dasar (data bentang alam kawasan lindung) dan peta tematik sesuai skala peta yang telah ditentukan serta data non teknik yang meliputi data peraturan terkait, data institusi/kelembagaan, dan data sosial budaya (kearifan lokal).
2. Jenis-jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Kawasan Lindung Kabupaten Blora yaitu :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

Peta dengan skala 1 : 100.000 sampai 1 : 50.000 yang berisi informasi batas administrasi sampai Kecamatan, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan pemanfaatan lahan existing.
 - b. Peta Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan
Peta dengan skala 1 : 250.000 yang berisi informasi unit lahan, kelerengan, jenis tanah, kontur tanah, dan lain-lain.
 - c. Citra Satelit
Citra akuisisi terbaru dengan skala sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan.
 - d. RTRW Kabupaten Blora
RTRW Kabupaten Blora dengan skala 1 : 100.000 sampai 1 : 50.000.
3. Data Non-Teknik
Data non-teknik yang berisi data pembiayaan termasuk biaya OP, peraturan-peraturan terkait, data institusi/kelembagaan, data sosial ekonomi dan budaya (kearifan lokal), serta data lainnya yang terkait.

c. Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi potensi wilayah yang dilakukan meliputi identifikasi jenis dan sumber daya, identifikasi pemanfaatan sumber daya kawasan lindung serta identifikasi potensi pengembangan wilayah yang dilakukan melalui survei lapangan untuk pengumpulan data yang belum tersedia.

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan meliputi :

- Data primer yang dilakukan secara sistematis melalui perekaman data (observasi, pengambilan sampling, penghitungan, pengukuran, wawancara);

- Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survei lapangan meliputi kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi geologi serta rencana/studi terkait lainnya.

d. Analisis dan Pengolahan Data

Analisis yang dilakukan berupa :

- Analisis Kebijakan

Analisis kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi dan Kabupaten Blora serta menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah.

- Analisis Kewilayahan

Analisis kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.

- Analisis Sosial Ekonomi

Analisis kondisi sosial ekonomi dan strukturnya di wilayah perencanaan.

- Analisis Daya Dukung

Analisis daya dukung fisik lingkungan meliputi : geografi, geo-morfologi, hidrologi, eko-biologis dan daya dukung sosial, ekonomi, budaya dan politik.

- Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Analisis potensi kawasan lindung berdasarkan kriteria-kriteria teknis kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan.

1.4 Standar Teknis dan Landasan Hukum

1.4.1 Standar Teknis

Standar teknis yang akan digunakan dalam kegiatan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

1.4.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;

1.5 Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung, yang meliputi:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi informasi berikut:

1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Tanggapan KAK
4. Metodologi
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan

b. Laporan Akhir

Laporan akhir berisi hasil akhir dari penyusunan dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Pada laporan ini terdapat gambaran umum wilayah dan

proses inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan lindung di Kabupaten Blora, serta hasil pengukuran luasan kawasan lindung dan analisisnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Pendahuluan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud, tujuan, ruang lingkup, standar teknis, landasan hukum, keluaran dan sistematika penulisan.

BAB II TANGGAPAN KAK

Bab ini menjelaskan mengenai tanggapan terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) kegiatan Inventarisasi Kawasan Lindung.

BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan metodologi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi kawasan lindung, mulai dari metodologi pengambilan data hingga metode analisis yang akan dilakukan.

BAB IV JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Bab ini berisi jadwal kegiatan mulai dari persiapan, survei, pengolahan, analisis dan evaluasi data, serta perbaikan dan penyelesaian akhir.

Bab 2

Tanggapan KAK

2.1 Latar Belakang

- Latar belakang pada KAK berisi mengenai dampak dari pembangunan terhadap kawasan lindung, kondisi dan permasalahan kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Blora.
- Latar belakang yang disampaikan dalam KAK menggambarkan tantangan dan elemen pendukung terlaksananya pekerjaan penyusunan inventarisasi kawasan lindung Kabupaten Blora.
- Secara umum, pelaksana pekerjaan menyetujui apa yang termuat dalam latar belakang KAK penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora sebagai berikut:

Dewasa ini pembangunan di Kabupaten Blora semakin meningkat yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, namun di sisi lain ketersediaan sumber daya alam dan kawasan ruang semakin terbatas. Kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat sehingga tidak mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan hidup maupun fungsi kawasan lindung sebagai penyangga kehidupan. Pendayagunaan kawasan dengan segala potensi yang ada di dalamnya harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan kawasan lindung yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan lindung mempunyai fungsi, kedudukan dan peranan penting sebagai pendukung kehidupan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penataan, pemulihan dan perlindungan secara berkelanjutan.

Kondisi kawasan lindung di Kabupaten Blora masih cukup baik, namun demikian perlu upaya pengendalian secara bijaksana baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga tidak mengalami degradasi kerusakan lingkungan. Selain itu perlu dijaga jangan sampai mengalami penyusutan luas, alih fungsi lahan, konflik penguasaan pemanfaatan lahan dan sebagainya. Dengan demikian fungsi kawasan lindung harus tetap terjaga secara optimal baik untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun ekologi.

Hal-hal tersebut yang mendasari perlunya disusun Inventarisasi Kawasan Lindung di Kabupaten Blora untuk mewujudkan perencanaan kawasan lindung di daerah yang

menyeluruh serta mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dan kelestarian lingkungan. Selain itu dokumen inventarisasi kawasan lindung merupakan rencana makro jangka panjang yang berisi tentang arah kebijakan dan strategi perencanaan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Blora. Sebelumnya pada Tahun 2008 sudah pernah disusun dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Namun demikian seiring perkembangan waktu telah terjadi perubahan peruntukan wilayah untuk pembangunan di Kabupaten Blora. Kondisi kawasan lindung perlu disesuaikan kembali berdasarkan kondisi eksisting, sehingga pada Tahun 2020 ini perlu dilakukan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora untuk mewujudkan perencanaan kawasan lindung yang lebih menyeluruh.

2.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Maksud penyusunan dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora telah disampaikan dalam KAK. Selanjutnya pelaksana pekerjaan memahami maksud pekerjaan sebagaimana tersebut sebagai berikut:

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora ini adalah untuk melakukan Inventarisasi dan Identifikasi secara detail luasan, bentuk dan kondisi fisik kawasan lindung di Kabupaten Blora sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan pemerintah daerah bagi arah pembangunan dan pengelolaan kawasan lindung yang lebih efisien dan bermanfaat di Kabupaten Blora.

b. Tujuan

- Tujuan penyusunan dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora telah disampaikan dalam KAK. Selanjutnya pelaksana pekerjaan memahami tujuan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut sebagai berikut:

Tujuan dari pekerjaan Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora adalah tersedianya data kawasan lindung yang dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijakan serta acuan dalam kegiatan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora sehingga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

2.3 Sasaran

- Sasaran pelaksanaan pekerjaan ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan pekerjaan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora sebagaimana yang disebutkan dalam KAK. Pelaksana pekerjaan memahami sasaran pekerjaan yang dimaksud sebagai berikut:

Sasaran dari kegiatan ini antara lain :

- a. Terinventarisasinya data-data terkait kawasan lindung yang dapat dijadikan pemerintah daerah sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung, arahan indikasi program dan dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan zona;*
- b. Teridentifikasinya kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri atas kawasan hutan yang berfungsi lindung, kawasan lindung diluar kawasan hutan yang mempunyai fisiografi seperti hutan lindung serta kawasan resapan air;*
- c. Teridentifikasinya kawasan perlindungan setempat, terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air serta RTH di kawasan perkotaan;*
- d. Teridentifikasinya kawasan suaka alam, terdiri atas kawasan cagar alam;*
- e. Teridentifikasinya kawasan lindung geologi, terdiri atas kawasan cagar alam geologi meliputi kawasan kars serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi : kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air;*
- f. Teridentifikasinya kawasan lindung lainnya, terdiri atas cagar budaya;*
- g. Tersedianya kajian dan analisis kawasan lindung beserta peta kawasan lindung;*
- h. Tersusunnya rencana pola ruang kawasan lindung termasuk upaya pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;*
- i. Tersedianya perencanaan pengembangan Sistem Informasi Kawasan Lindung yang memuat informasi sebaran kawasan lindung, status kawasan lindung, kondisi kawasan lindung serta informasi kawasan lindung lainnya.*
- j. Terwujudnya kesamaan persepsi, strategi, kelembagaan dan peran para pihak dalam penanganan pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Blora*
- k. Tersedianya kajian/telaahan prakiraan biaya inventarisasi kawasan lindung di wilayah studi dan unsur kelembagaannya.*

2.4 Sumber Pendanaan

- Pada KAK telah mengemukakan sumber pendanaan pekerjaan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung secara jelas. Pelaksana pekerjaan menerima besaran dana tersebut untuk melakukan pekerjaan, didalam dana tersebut termasuk pajak yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Besaran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora menggunakan sumber anggaran dari APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

2.5 Lokasi

- Dokumen KAK telah menyebutkan lokasi pelaksanaan pekerjaan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Selanjutnya pelaksana kegiatan memahami lokasi yang dimaksud, yaitu:

Kegiatan pekerjaan ini dilaksanakan di Kabupaten Blora dengan pemilik kegiatan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.

2.6 Standar Teknis

- Standar teknis yang digunakan dalam pekerjaan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora telah dijelaskan dalam dokumen KAK. Standar teknis yang digunakan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pelaksana pekerjaan memahami standar teknis tersebut dan akan mengacu pada standar teknis yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan berikut ini:

Standar teknis yang akan digunakan dalam pekerjaan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

2.7 Dasar Hukum

- Dasar hukum yang digunakan dalam pekerjaan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora telah dijelaskan dalam dokumen KAK. Dasar hukum yang digunakan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pelaksana pekerjaan memahami dasar hukum tersebut dan akan mengacu serta memperhatikan dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan berikut ini:

Landasan hukum untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;*
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;*
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;*
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;*
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;*
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;*
- 9. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031;*
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;*

2.8 Lingkup Pekerjaan

- Dokumen KAK telah menjelaskan lingkup pekerjaan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Pelaksana pekerjaan memahami lingkup pekerjaan tersebut dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan berikut:

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora ini meliputi :

a. Persiapan

1. *Membuat program kerja kegiatan secara keseluruhan;*
2. *Penyiapan administrasi;*
3. *Menetapkan metode survei;*
4. *Menyusun jadwal kerja, penugasan tenaga ahli dan kegiatan persiapan lain yang dibutuhkan;*
5. *Studi literatur sebagai awal awal atau referensi pelaksanaan kegiatan.*

b. Pengumpulan Data

1. *Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data sekunder yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya dan isu-isu perencanaan, serta pengumpulan peta dasar (data bentang alam kawasan lindung) dan peta tematik sesuai skala peta yang telah ditentukan serta data non teknik yang meliputi data peraturan terkait, data institusi/kelembagaan, dan data sosial budaya (kearifan lokal).*
2. *Jenis-jenis data serta kedalaman informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Kawasan Lindung Kabupaten Blora yaitu :*
 - a. *Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)*
 - *Skala 1 : 100.000 sampai 1 : 50.000.*
 - *Kedalaman informasi : batas administrasi sampai Kecamatan, gedung dan bangunan, jaringan jalan dan pemanfaatan lahan existing.*
 - b. *Peta Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan*
 - *Skala 1 : 250.000.*
 - *Kedalaman informasi : unit lahan, kelerengan, jenis tanah, kontur tanah, dan lain-lain.*
 - c. *Citra Satelit*
 - *Citra akuisisi terbaru dengan skala sesuai dengan resolusi yang dibutuhkan.*
 - d. *RTRW Kabupaten Blora*
 - *Skala 1 : 100.000 sampai 1 : 50.000.*
3. *Data Non-Teknik*

Data pembiayaan termasuk biaya OP, peraturan-peraturan terkait, data institusi/kelembagaan, data sosial ekonomi dan budaya (kearifan lokal), serta data lainnya yang terkait.

c. Penyusunan Laporan Pendahuluan

Penyusunan laporan pendahuluan berdasar pengumpulan data sekunder dan selanjutnya dilakukan presentasi laporan pendahuluan yang bertujuan untuk mensosialisasikan hasil-hasil penyusunan rencana zonasi sampai pada tahap Laporan Pendahuluan, selain itu untuk menjaring masukan serta perbaikan data dan informasi.

d. Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi potensi wilayah yang meliputi identifikasi jenis dan sumber daya, identifikasi pemanfaatan sumber daya kawasan lindung serta identifikasi potensi pengembangan wilayah yang dilakukan melalui survei lapangan untuk pengumpulan data yang belum tersedia.

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan meliputi :

- *Data primer yang dilakukan secara sistematis melalui perekaman data (observasi, pengambilan sampling, penghitungan, pengukuran, wawancara, kuesioner atau focus group discussion);*
- *Data sekunder yang akan dikumpulkan dalam survei lapangan meliputi kebijakan, kondisi fisik wilayah, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemanfaatan ruang eksisting, kondisi geologi serta rencana/studi terkait lainnya.*

Pengumpulan data sekunder ini sebagai lanjutan dari pengumpulan data sekunder pada tahap pembuatan laporan pendahuluan sebelumnya.

e. Analisis dan Pengolahan Data

- *Analisis Kebijakan*
Analisis kedudukan wilayah perencanaan terhadap kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi dan Kabupaten Blora serta menyesuaikan perencanaan yang dibuat dengan kebijakan pembangunan daerah.
- *Analisis Kewilayahan*
Analisis kecenderungan perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.
- *Analisis Sosial Ekonomi*
Analisis kondisi sosial ekonomi dan strukturnya di wilayah perencanaan.
- *Analisis Daya Dukung*
Analisis daya dukung fisik lingkungan meliputi : geografi, geo-morfologi, hidrologi, eko-biologis dan daya dukung sosial, ekonomi, budaya dan politik.

- *Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*
Analisis potensi kawasan lindung berdasarkan kriteria-kriteria teknis kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan.
Analisis ini menggunakan metode overlay peta untuk masing-masing variabel fisik, sosial ekonomi dan budaya berdasarkan kriteria kegiatan. Dari hasil analisis ini akan dihasilkan kesesuaian lahan pemanfaatan ruang dalam bentuk peta kesesuaian pemanfaatan ruang yang meliputi kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung/konservasi, kawasan pemanfaatan umum, zona penyangga dan kawasan strategis.

f. Penyusunan Laporan Akhir

- *Penyusunan Laporan Akhir memuat pembahasan substansi mengenai : tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung, rencana struktur ruang wilayah kawasan lindung, rencana pola ruang kawasan lindung, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang mencakup penetapan zona hingga arahan sub zona pada setiap zona, indikasi program utama, rekomendasi terhadap RTRW Kabupaten Blora dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung Kabupaten Blora.*
- *Album Peta dan Gambar Lokasi dengan skala yang telah ditentukan.*

2.9 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan

- Dalam KAK telah dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora, yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Selanjutnya pelaksana pekerjaan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

2.10 Kebutuhan Tenaga Ahli

- Dokumen KAK telah menjelaskan kebutuhan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Pelaksana pekerjaan selanjutnya akan menyediakan kebutuhan tenaga ahli sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai berikut :

1. *Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota*

1 (satu) orang *team leader/ahli perencanaan wilayah dan kota*, S1 dengan pengalaman pekerjaan minimum selama 7 (tujuh) tahun atau S2 dengan pengalaman kerja minimum 2 (tiga) tahun, mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

2. *Ahli Geodesi*

1 (satu) orang *Ahli Geodesi*, S1 dengan pengalaman pekerjaan minimum selama 5 (lima) tahun atau S2 dengan pengalaman kerja minimum 1 (satu) tahun. Memiliki kompetensi melaksanakan pemetaan tanah dengan metode teristris, fotogrameris, remote sensing maupun GPS. Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Geodesi (217) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

3. *Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi*

1 (satu) orang *Ahli Perencana Wilayah dan Kota*, S1 dengan pengalaman pekerjaan minimum selama 5 (lima) tahun atau S2 dengan pengalaman kerja minimum 1 (satu) tahun. Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa.

4. *Tenaga Penunjang*

Dalam melakukan kegiatan, *personil tenaga ahli* dapat dibantu oleh asisten tenaga ahli (2 orang) yaitu *Asisten Tenaga Ahli Pemetaan* dan *Asisten Tenaga Ahli Teknik Lingkungan*. *Asisten Tenaga Ahli* yang disyaratkan adalah diutamakan memiliki pengalaman setidaknya 1 (satu) tahun sejak lulus Sarjana (S1).

Untuk menunjang pekerjaan *Tenaga Ahli* tersebut, diperlukan *Tenaga Pendukung* dalam pekerjaan ini antara lain: *surveyor*, *drafter*, *operator komputer*, *sekretaris/ administrasi*, dan *sopir*.

2.11 Sistematika Laporan

- Dokumen KAK telah menjelaskan sistematika laporan penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora. Pelaksana pekerjaan memahami sistematika tersebut dan akan membuat laporan sesuai dengan sistematika laporan berikut:

a. *Laporan Pendahuluan*

Laporan Pendahuluan memuat:

1. *Pemahaman Konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus dilakukan;*
2. *Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisis yang akan dipergunakan;*
3. *Organisasi Pelaksanaan dan tenaga pelaksana yang akan ditempatkan dalam studi ini;*
4. *Rencana kerja, jadwal pelaksanaan studi, metodologi yang digunakan, metode analisis, pengumpulan data yang harus dilakukan serta rencana pelaporan;*
5. *Pengumpulan data sekunder dan bahan peta dasar (data bentang alam) serta peta tematik sesuai skala peta yang telah ditentukan;*
6. *Laporan pendahuluan disusun berdasar pengumpulan data-data sekunder dan bahan peta dasar tentang sumber daya dan isu-isu perencanaan.*

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 buku laporan.

b. *Laporan Akhir*

Laporan Akhir terdiri dari:

1. *Laporan Akhir (materi teknis), merupakan laporan akhir Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora yang mengakomodir semua masukan-masukan hasil diskusi dari konsep laporan akhir yang sudah disetujui tim teknis, dibuat sebanyak 10 buku.*

Sistematika penyusunan inventarisasi kawasan lindung minimal sebagai berikut :

- *Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, landasan hukum;*
- *Bab II Metodologi Studi, berisi pendekatan pelaksanaan kegiatan, kebutuhan data, perancangan konsep SIG Kawasan Lindung, mekanisme pengumpulan data dalam perancangan SIG, proses digitalisasi soasial database, teknis analisis data dalam perancangan SIG, proses digitalisasi sosial database, teknis analisis data dalam perancangan SIG Kawasan Lindung, penyusunan*

SIG Kawasan Lindung, perencanaan pengembangan Sistem Informasi Kawasan Lindung, Jadwal Kegiatan.

- *Bab III Gambaran Umum Wilayah Studi, berisi kebijakan RTRW Provinsi Jawa Tengah, kebijakan RTRW Kabupaten Blora, tinjauan kondisi fisik alam, tinjauan umum penggunaan lahan, tinjauan umum kondisi kependudukan, aspek perekonomian, tinjauan umum kondisi prasarana dan sarana;*
 - *Bab IV Mekanisme dan Rancangan Pelaksanaan Pekerjaan, berisi proses inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan lindung, inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan perlindungan setempat, inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan suaka alam pelestarian alam dan budaya, inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan rawan bencana, inventarisasi pengukuran dan pemetaan kawasan lindung geologi;*
 - *Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi*
Penyedia jasa dapat mengatur materi dan urutan sistematika dengan pertimbangan pemberi kerja.
2. *Ringkasan Eksekutif, ringkasan Laporan Akhir dibuat sebanyak 10 buku yang diserahkan bersama dengan penyerahan Laporan Akhir*
 3. *Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1 : 25.000 dalam format A1 berwarna sebanyak 2 album dan ukuran A3 berwarna sebanyak 10 album yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS).*
 4. *Laporan dalam bentuk Soft Copy, berisi semua laporan dan data-data terkait pekerjaan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora dimasukkan kedalam Flasdisk sebanyak 3 (tiga) buah dan ke dalam External Hard Disk 1 Tera sebanyak 1 (satu) buah.*

Laporan akhir beserta kelengkapannya harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK.

Bab 3

Metodologi

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora 2020 dalam kegiatan Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah, metode yang di gunakan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) guna mendapatkan hasil yang sesuai. Permasalahan yang sering di dapatkan dalam pengembangan Sistem INdomrasi Geografis sendiri adalah keterbatasannya waktu dan pekerjaan karena dalam kenyataanya pengembangan SIG (*Sistem Informasi Geografis*) tidak hanya sekedar membeli perangkat lunak dan keras namun lebih dalam bagaimana pengembangan basis data dan pengolahan data.

Dalam kegiatan inventarisasi ini, penyusun tidak hanya melakukan kegiatan penyusunan Sistem Infomrasi Kawasan Lindung belaka, namun juga di harapkan dapat melakukan inventarisasi data Kawasan lindung dengan baik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wilayah studi sudah pernah melakukan Penyusunan Inventarisasi Kawasan lindung pada tahun 2008 namun karena adanya perkembangan waktu telah terjadi perubahan peruntukan wilayah sehingga perlu adanya penginventarisasian Kembali. Diharapkan dalam penyusunan ini agar sesuai dengan sasaran sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Hal ini dapat tercapai dengan menggunakan metode-metode pengumpulan dan analisis data yang tepat sasaran.

Penelitian ini akan diawali dengan melakukan pencarian kebutuhan data guna mendapatkan dan melakukan identifikasi data geografisnya. Selain itu perlunya upaya pengidentifikasian kriteria - kriteria Kawasan lindung yang berada pada wilayah studi. Kriteria-kriteria ini nantinya akan di dapatkan melalui sintesa berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Kawasan lindung. Lalu penyusun melakukan perbandingan antara inventarsasi Kawasan lindung sebelumnya dengan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW. Berdasakan ini, survei data dilakukan berdasarkan hasil analisis. Metode di dasarkan atas penidentifikasian kawasan lindung, yaitu :

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
- Kawasan perlindungan setempat

- Kawasan Konservasi
- Kawasan lindung geologi
- Kawasan lindung lainnya

Berdasarkan kriteria ini, diharapkan pengelompokan kelas kawasan lindung. Dari hasil pengklasifikasian dan penggolongan kelas kawasan lindung selanjutnya dilakukan penyusunan Pemetaan dan perhitungan guna membuktikan penyebaran luasan kawasan lindung. Data spasial dilakukan dengan Teknik digitasi dari peta-peta lapangan, overlay beberapa peta-peta tematik (diantaranya peta jenis tanah, kelerengan, curah hujan, topologi, sempadan sungai, sempadan waduk, mata air, danau dan waduk, dsb.).

3.2 Kebutuhan Data

Dalam memperoleh gambaran Kawasan lindung secara menyeluruh di Kabupaten Blora dibutuhkan dukungan data sebagai input untuk proses analisis dan penelitian.

Pada umumnya kualitas analisis yang dihasilkan tergantung dengan kualitas data sebagai input dan proses pengolahan data untuk mendukung keputusan yang di buat. penelitian kali ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu :

1. Data Primer, Merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, data ini dalam data-data mengenai kondisi Kawasan lindung dimana data ini nantinya didapatkan dari hasil survei dan observasi lapangan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui berbagai sumber sehingga tidak langsung di peroleh melalui subjek penelitian. Biasanya data sekunder di dapatkan melalui sumber-sumber dokumentasi yang telah dipublikasikan. Data ini digunakan guna membantu dalam melakukan identifikasi kondisi serta keadaan fisik wilayah penelitian terutama dalam menentukan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis Kawasan lindung.

Tabel 3. 1 Kriteria Kawasan Lindung

No.	Jenis kawasan lindung		Kriteria kawasan lindung	Keterangan
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya	Kawasan hutan lindung	- Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;	Mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah
			- Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau	
			- Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.	
			- Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (Lima Belas Persen)	
		Kawasan resapan air	- Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun;	memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu guna memelihara persediaan sumber air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahnya maupun kawasan yang bersangkutan
			- Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;	
			- Mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter/hari;	
			- Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;	
			- Kelerengan kurang dari 15%;	
			- Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.	

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora
USULAN TEKNIS

No.	Jenis kawasan lindung		Kriteria kawasan lindung	Keterangan
2.	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai	- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;	melindungi fungsi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
			- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;	
			- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.	
		Kawasan danau/waduk sekitar	- Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi;	melindungi waduk dari kegiatan pemanfaatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk.
			- Daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk.	
		Ruang terbuka hijau kota	- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;	menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, iklim, mikroklimat, ekosistem dan habitat fauna.
- Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;				
- Didominasi komunitas tumbuhan.				
3.	Kawasan Konservasi	Kawasan suaka alam	Cagar alam	- Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa atau tipe ekosistemnya
				- Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya
				- Mempunyai kondisi fisik alam, baik tumbuhan maupun satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora
USULAN TEKNIS

No.	Jenis kawasan lindung		Kriteria kawasan lindung	Keterangan	
			- Mempunyai luas atau bentuk tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas		
			- Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah dan keberadaannya memerlukan suatu upaya konservasi		
			- Terdapat komunitas tumbuhan dan/ atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan keberadaanya terancam punah.		
		Suaka margasatwa	- Tempat hidup atau perkembangbiakan dari suatu jenis satwa langka dan/ atau hampir punah.		
			- Memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi		
			- Merupakan tempat hidup suatu jenis satwa migran tertentu		
			- Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan		
		Kawasan pelestarian alam	Hutan raya	- Memiliki keadaan menarik dan indah baik alamiah maupun buatan	
				- Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olahraga	
				- Mengandung satwa buru yang dapat dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur	
				- Mempunyai luas yang cukup serta tidak membahayakan	
		Kawasan pelestarian alam	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	- Mempunyai wilayah yang cukup guna menjamin proses ekologis	
				- Memiliki sumber daya hayati dan gejala alam yang unik dan khas yang masih alami	
				- Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh	
		Kawasan pelestarian alam	Taman Hutan Raya	- Merupakan wilayah yang dapat dibagi dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona keperluan	
- Memiliki wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan dengan wilayah yang ekosistemnya masih utuh maupun sudah merubah					
- Wilayah yang memilki keindahan alam dan/ atau gejala alam					

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora
USULAN TEKNIS

No.	Jenis kawasan lindung			Kriteria kawasan lindung	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa 	
			Taman wisata alam dan taman wisata alam laut	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai daya tarik alam berupa, tumbuhan, satwa, atau bentang alam, gejala alam, serta formasi geologi yang unik. - Memiliki arsitektur bentang alam yang baik - Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata alam 	
		Kawasan taman buru	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki luas yang tepat dan tidak membahayakan dalam kegiatan berburu - Terdapat satwa buru yang dikembangkan yang memungkinkan perburuan secara rutin dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa. 		
4	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan cagar alam geologi	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria memiliki bentang alam karst. 	Menjaga kelestarian kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam;	
Kawasan sempadan mata air		<ul style="list-style-type: none"> - Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; - Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. 	melindungi mata air dari kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.		
Kawasan imbuhan air tanah		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti 	Melindungi area yang memiliki kemampuan dalam melakukan		
		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki hubungan dengan hidrogeologis yang menerus dengan lepadan 			

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora
USULAN TEKNIS

No.	Jenis kawasan lindung		Kriteria kawasan lindung	Keterangan
			- Memiliki muka air tanah tidak tetekan yang letaknya lebih tinggi dari muka air tanah yang tertekan.	peresapan air tanah secara alami.
5	Kawasan Lindung Lainnya	Cagar biosfer	- Memiliki keterwakilan ekosistem yang masih alami, kawasan yang suda mengalami degradasi, mengalami modifikasi, atau kawasan binaan.	
			- Memiliki komunitas alam yang unik, langka dan indah	
			- Merupakan bentang alam yang cukup luas yang mencerminkan komunitas alam dengan manusia beserta kegiatannya secara harmonis.	
			- Berupa tempat bagi pemantauan perubahan ekologi melalui penelitian dan pendidikan	
		Ramsar	- Merupakan lahan basah baik yang bersifat alami atau mendekati alami yang mewakili langka atau unit yang sesuai dengan biogeografisnya.	
			- Mendukung Spesies Rentan, langka, hampir hampir langka, atau ekologi komunitas yang terancam.	
			- Mendukung Keaneragaman Populasi satwa dan/flora saat melewati masa kritis dalam hidupnya.	
			- Merupakan tempat perlindungan bagi satwa dan/flora saat melewati masa kritis hidupnya.D48:G55	
		Daerah perlindungan plasma nuffah	- Memiliki jenis plasma nuffah tertentu yang belum terdapat di kawasan konservasi lain yang telah di ditetapkan	
			- Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan sehingga memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nuffah	
		Daerah satwa pengungsian	- Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut	
			- Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut	

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora
USULAN TEKNIS

No.	Jenis kawasan lindung		Kriteria kawasan lindung	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut 	
		Cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Situs purbakala 	
		Kawasan pantai berhutan bakau	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat 		

Sumber : Maryono, 2008

Dalam melakukan inventarisasi kawasan lindung di kabupaten Blora, acuan jenis kawasan lindung yang akan ditelaah mengacu pada peraturan perundangan yang terbaru berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung dan peraturan perundangan tata ruang terbaru.

Dalam Kegiatan Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah (Penyusunan Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora), rencana data yang akan di cari adalah :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung;
 - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar waduk;
 - c. Ruang terbuka hijau
- (3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas :
 - a. Cagar alam;
 - b. Taman hutan raya;
 - c. Taman wisata alam;
- (4) Kawasan lindung geologi, terdiri atas :
 - a. Kawasan cagar alam geologi;
 - b. Kawasan Sempadan Mata Air
 - c. Kawasan Imbuhan Air Tanah
- (5) Kawasan lindung lainnya
 - a. Cagar Budaya

3.3 Metodologi Pengambilan Data

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengambilan Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan peneliti dengan melakukan survei ke lapangan secara langsung maupun melalui narasumber yang terkait dengan penelitian. Teknik pengambilan data primer yang akan di lakukan oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah :

1. Observasi

Teknik Observasi atau biasanya lebih dikenal dengan pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan dan mengidentifikasi fenomena-fenomena apa yang ditemui pada objek penelitian di lapangan. Menurut Sugiyono (2014). Dalam penelitian kali ini observasi di perlukan guna mendapatkan data serta verifikasi lokasi Kawasan Lindung di wilayah penelitian.

2. Pemetaan

Pemetaan ini dilakukan secara langsung melalui pemrosesan data spasial analisis dengan bantuan alat SIG. yang dimana dilakukan dengan melakukan penitikan di lokasi yang tidak berhasil di dapatkan melalui data sekunder. Selain itu juga di fungsikan untuk validasi data.

b. Teknik Pengambilan Data Sekunder

Pengambilan data Sekunder Pada penelitian kali ini di dapatkan oleh peneliti melalui kajian literatur, survei instansi, dan hasil unduhan dari *website* lembaga tertentu. Teknik pengambilan data sekunder yang di lakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kajian Literatur

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi melalui cara membaca dan mempelajari literatur serta penelitian yang sudah ada serta memiliki tema yang relevan dengan penelitian.

2. Survei Instansi

Survei Instansi di lakukan guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penggunaan, pengelolaan, dan karakteristik kawasan lindung di kabupaten Blora selian itu juga di gunakan untuk mencari Sosial budaya serta keadaan fisik di kawasan kabupaten Blora.

3.3.3 Mekanisme Pengumpulan Data

a. Persiapan Survei

Persiapan Survei akan dilakukan guna mempersiapkan dan merencanakan survei dengan matang. Persiapan yang akan di lakukan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan berkas perizinan untuk melakukan survei
- Tabel Kebutuhan data untuk Survei
- Penentuan pembagian jumlah tenaga kerja dan surveyor
- Melakukan Pembuatan Desain Formulir Observasi
- Pengkoordinasian Jadwal Survei
- Menyiapkan lamanya estimasi survei

- Melakukan pengecekan ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang ada di lapangan.
- Mempersiapkan Anggaran Survei

b. Survei Inventarisasi

Survei Inventarisasi Kawasan lindung akan di lakukan guna mendapatkan informasi mengenai perubahan karakteristik dan perebaran serta perubahan yang terjadi pada kawasan lindung pada kabupaten Blora.

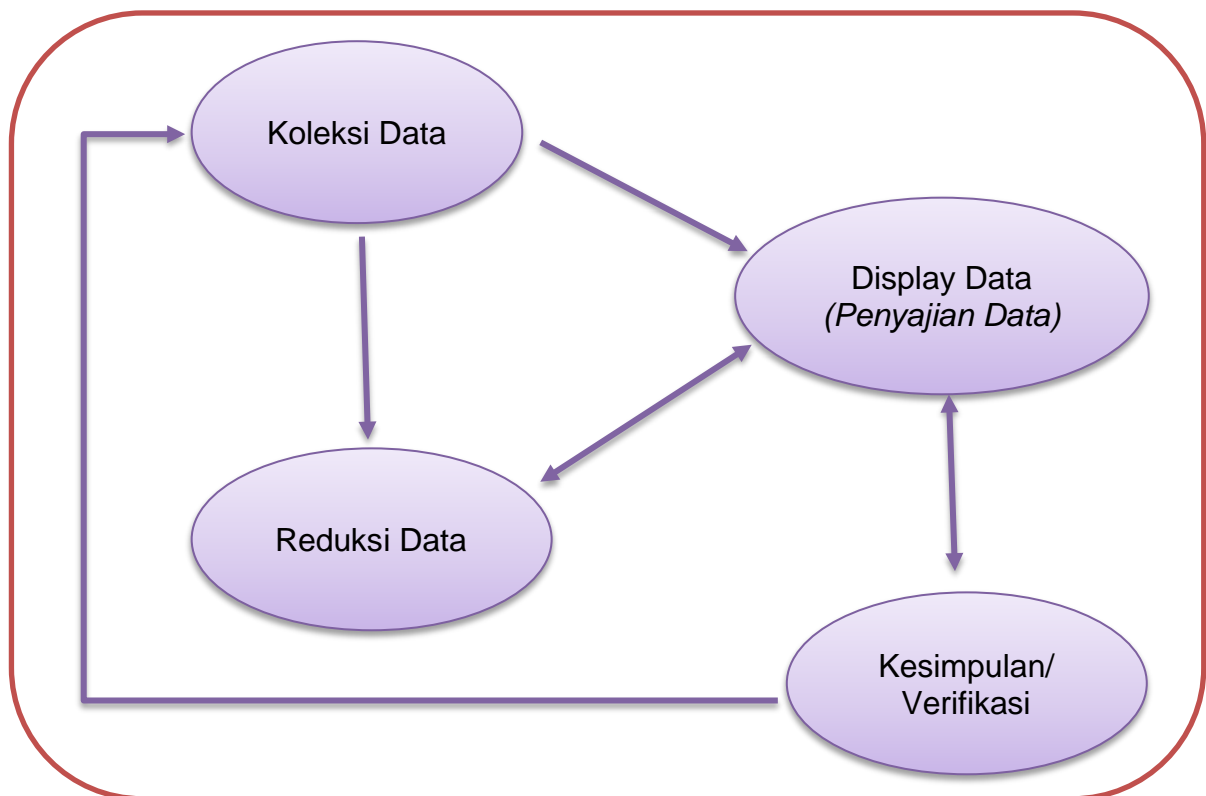
Dalam berjalannya survei ini akan dilakukan dengan melakukan survei langsung di lapangan maupun dengan meminta informasi dan data-data yang dimiliki instansi terkait

3.4 Teknik Analisis

Langka Langkah Pengolahan data (Hasan, 2006) yang akan digunakan pada kegiatan ini adalah :

1. Editing, merupakan kegiatan pengecekan dan pengkoreksian data yang telah terkumpul dengan mengacu kepada daftar kebutuhan data sebelumnya. Selain itu editing juga di gunakan untuk melakukan penghilangan data yang salah selama di lakukan pengecekan di lapangan. Selain itu editing bisa di lakukan Bersama dengan verifikasi. Selain itu table akan di buat untuk memudahkan dalam kegiatan verifikasi dan editing.
2. Pengklasifikasian, Kegiatan ini akan di lakukan dengan melakukan membagi data dari hasil survei ked lam kelompok data berdasarkan gejala atau kategory yang sudah di tetapkan sebelumnya.
3. Validasi, merupakan penilaian terhadap data yang telah terkumpul guna melihat akurasi, dengan permasalahan yang sedang di teliti, serta tingkat kepercayaan dan tingkat representasi terhadap permasalahan.
4. Tabulasi, merupakan proses akhir dalam penyusunan suatu data. Dalam proses ini dilakukan dengan tujuan supaya data yang tersedia dapat dibaca, diinterpretasikan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

Penyajian data hingga penarikan kesimpulan adalah suatu proses dan siklus dan memiliki sifat interaktif (Sugiyono, 2005). Hal ini bisa di lihat pada bagan/gambar di bawah ini:



Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Pada model interaktif, analisis data kualitatif dilakukan berulang dan berlanjut. Reduksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sehingga menunjukkan gambaran keberhasilan yang berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling terkait.

Pendekatan analisis yang dilakukan dalam penyelesaian studi ini yang di dasarkan pada sasaran yang telah di ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu :

Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebanyak -banyaknya dari berbagai sumber tetapi tidak dilakukan dengan tujuan untuk membuat generalisasi. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk :

Analisis Normatif

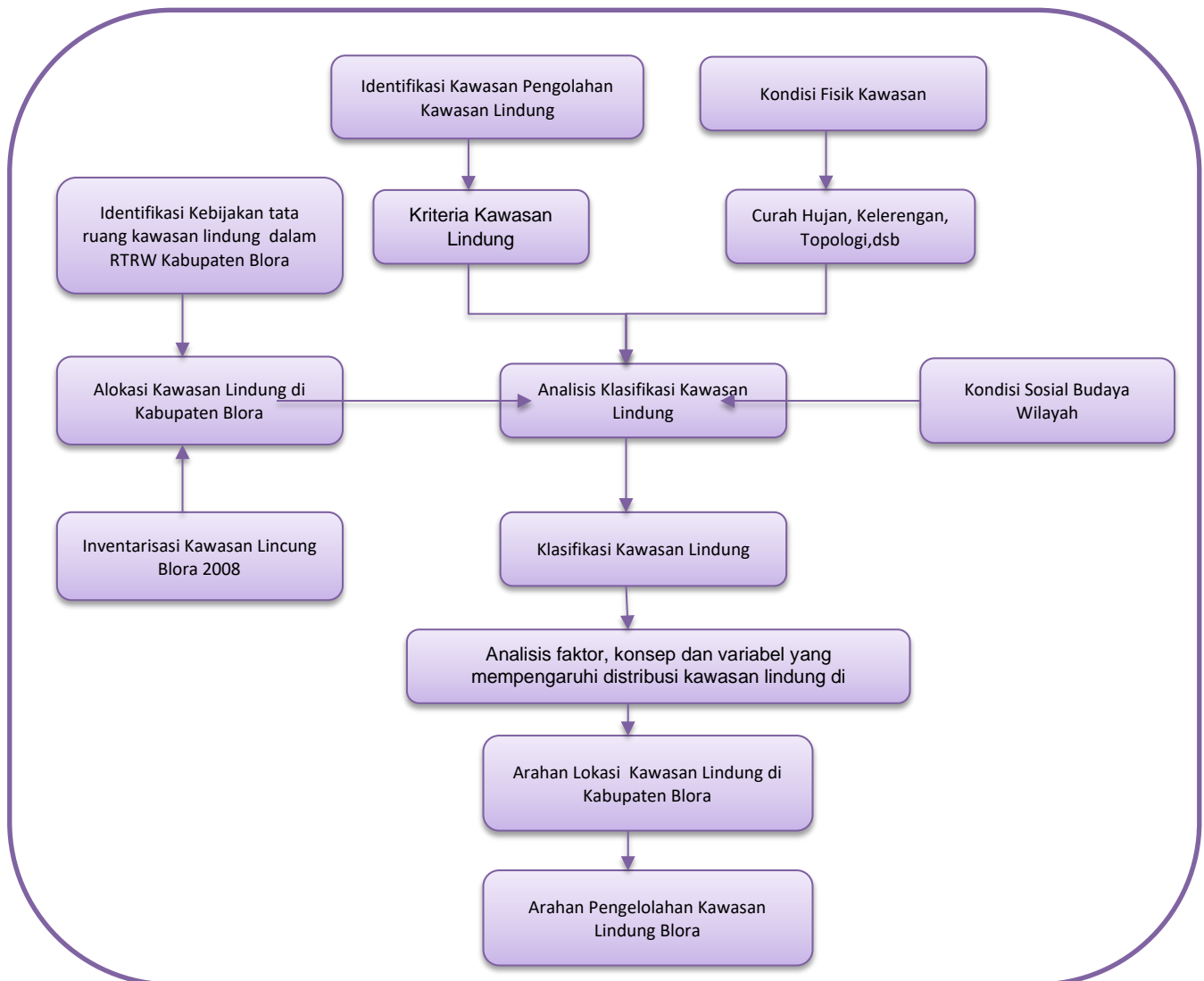
Analisis Nirmatif merupakan analisis terhadap keadaan yang seharusnya mengikuti suatu kondisi ideal tertentu atau bagaimana permasalahan dipandang dari suatu kaidah, dalil atau norma umum yang berlaku luas yang bisa dijadikan semacam standar. Analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana kondisi yang seharusnya berjalan pada wilayah studi.

Analisisi Spasial

Analisis spasial sendiri merupakan suatu proses penggunaan teknik analisis pada seperangkat data geografis yang akan menghasilkan data/informasi geografis yang baru (Peter,2003). Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan penulis akan di bantu dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis). Metode analisis spasial yang akan digunakan adalah metode overlay yang di mana maenggabungkan beberapa data spasial sehingga dapat menghasilkan data/informasi spasial yang baru.

Dalam penelitian kali ini diawali dengan melakukan kajian terhadap tata ruang wilayah kawasan lindung yang terkandung di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora. Berdasarkan analisi ini peneliti berharap hasil identifikasi kawasan lindung akan selaras dengan Pembaruan RTRW Kabupaten Blora. Selain itu juga dari hasil yang di dapatkan melalui RTRW akan di bandingkan dengan hasil Inventarisasi sebelumnya guna melihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya akan dilakukan kajian tentang kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan kawasan lindung di kabupaten Blora.

Berdasarkan hasil ini nanti akan didapatkan kriteria kawasan lindung yang di dasarkan dengan perundang-undangan terkait. Kriteria ini nanti akan di lanjutkan analisis dengan menggunakan data sekunder yang sudah di dapatkan. Analisis ini bernama analisis bentuk dan klasifikasi kawasan lindung. Ouput dari analisis ini nantinya akan berupa distribusi bermacam kawasan lindung di Kabupaten Blora. Lalu dari output tersebut dapat dihasilkan arahan alokasi kawasan lindung di Kabupaten Blora.



Gambar 3. 2 Flowchart Proses Pikir Pengukuran Dan Analisis Alokasi Kawasan Lindung

Bab 4

Organisasi Dan Jadwal Pelaksanaan

4.1 Umum

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ini harus di sertai pengorganisasian agar memiliki arahan yang jelas dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Pengorganisasian yang akan di lakukan terdiri dari penjabaran secara mendetail tentang komponen kegiatan dengan sistematika yang jelas sehingga dapat menggambarkan rincian keseluruhan kegiatan dengan baik. Selain hal tersebut, pengorganisasian juga terdiri dari pengalokasian personil, pengaturan jadwal kegiatan dan keterlibatan personil tenaga ahli.

4.2 Tenaga Ahli yang Ditugaskan

Dalam menunjang keberhasilan penyelesaian seluruh pekerjaan maka akan dibuat tim perencanaan yang terdiri dari beberapa personil yang memadai dengan keahlian masing-masing yang sesuai dengan jabatannya, baik untuk keperluan survei lapangan maupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di kantor, lengkap dengan bagian administrasi dengan di dukung dengan peralatan yang memadai.

a. Tenaga Ahli, Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan adalah Sarjana Strata-1 Sebanyak 4 (Empat) tenaga ahli, yang terdiri dari :

1. Ketua Tim (*Tim Leader*)

Ketua Tim merupakan seorang lulusan Sarjana S-1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan pengalaman pekerjaan minimum selama 7 (tujuh) tahun. Atau Sarjana S-2 dengan pengalaman kerja minimum 3 (Tiga) Tahun lulusan Universitas/Perguruan Tinggi negeri atau swasta yang telah di akreditasi. Diutamakan Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502) yang di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang (LPJK) Serta dilengkapi dengan referensi kerja dari pengguna jasa. Tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2. Tenaga Ahli Geodesi

Tenaga ahli geodesi yang disyaratkan adalah sarjana Teknik Strata-1 (S-1) Jurusan Geodesi lulusan univertitas/ Perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah di akreditasi yang berpengalaman dalam melaksanakan Pemetaan tanah

dengan metode teristris, fotogrameris, remote sending maupun GPS dengan pengalam kerja diutamakan/ disukai 5 (Lima) Tahun, Dlutamkan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)Ahli Geodesi (217) yang telah di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga berwenang (LPJK). Tenaga ahli tersebut utamanya ditugaskan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pemetaan, spesfikasi dan perhitungan teknis sesuai bidangnya.

3. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota/Planologi

Tenaga ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang disyaratkan adalah sarjana Teknik Strata-1 (S-1) Jurusan Geodesi lulusan univeritas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah di akreditasi yang berpengalaman dalam melaksanakan Inventarisasi Kawasan dengan pengalam kerja diutamakan/ disukai 5 (Lima) Tahun, Dlutamkan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Perencana (502) yang telah di terbitkan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi oleh Lembaga berwenang (LPJK). Tenaga ahli tersebut utamanya ditugaskan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Inventarisasi Kawasan Lindung dan Menyusun Sistem Informasi Geografis (GIS)

4. Tenaga Penunjang

Tenaga Penunjang yang disyaratkan adalah sarjana Teknik Strata-1 (S-1) dengan pengalaman kerja setidaknya 1 (Satu) Tahun sejak lulus sarjana (S1), Diutamakan merupakan tenaga ahli teknik lingkungan dan tenaga ahli Pemetaan.

b. Tenaga Pendukung, Untuk pelaksanaan pekerjaan ini tenaga ahli dibantu leh tenaga pendukung yaitu :

1. Surveyor (2 Orang)
2. Drafter (1 Orang)
3. Operator Komputer (1 Orang)
4. Sekertaris (1 Orang)
5. Sopir (1 Orang)

4.3 Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Secara garis besar organisasi pelaksanaan pekerjaan penyusun Inventarisasi Kawasan Lindung dapat dirumuskan Sebagai Berikut :

1. *Team Leader*
2. Tenaga Ahli Geodesi
3. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
4. Koordinator Asisten
5. Asisten Teknik Lingkungan
6. Asisten Perencanaan Wilayah Kota

Gambar 4. 1 Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Penyusun Inventarisasi Kawasan Lindung

4.4 Jenis Kegiatan

Kegiatan Penyusunan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan atau 90 Hari, agar kegiatan terlaksana dengan efektif dan efisien maka diperlukan jadwal kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang tepat

Secara umum urutan jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi tentang rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh, data dan informasi lapangan, mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung, jadwal kegiatan penyedia jasa.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung, rencana struktur ruang wilayah kawasan lindung, rencana pola ruang kawasan lindung, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang mencakup penetapan zona hingga arahan sub zona pada setiap zona, indikasi program utama, rekomendasi terhadap RTRW Kabupaten Blora dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung Kabupaten Blora.

4.5 Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan yang lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN 2020)															KET.
		JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					
		01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	
I	Laporan Pendahuluan																
1	Persiapan dan Koordinasi Awal	■															
2	Penyusunan Draft Laporan Pendahuluan	■	■														
3	Pengumpulan Laporan Pendahuluan		■														
4	Revisi Laporan Pendahuluan		■														
5	Pemaparan Laporan Pendahuluan		■														
II	Survei dan Analisis																
1	Survei I				■												
2	Survei II						■										
3	Survei III							■									
4	Analisi dan Pengolahan Data						■	■	■	■	■	■	■				
III	Laporan Akhir																
1	Penyusunan Laporan Akhir									■	■	■	■	■			
2	Paparan Laporan Akhir														■		

Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kawasan Lindung Kabupaten Blora
USULAN TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN 2020)															KET.
		JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					
		01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	
3	Revisi Laporan Akhir																
4	Pengumpulan Laporan Akhir dan Album																

Tabel 4. 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO.	POSISI	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN 2020)															KET.
		JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					
		01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	01-07	08-14	15-21	22-28	29-Agt	
I	TENAGA AHLI																
1	Ketua Tim																
2	Ahli Geodesi																
3	Ahli Pengembangan Wilayah																
4	Asisten Teknik Lingkungan																
5	Asisten GIS																
II	TENAGA PENDUKUNG																
1	Surveyor / Juru Ukur 1																
2	Surveyor / Juru Ukur 2																
3	Drafter																
4	Operator Komputer																
5	Skertaris																
6	Sopir																

DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia. 2017. *Peraturan No.13: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Republik Indonesia.
- Bappeda Kabupaten Blora. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kabupaten Blora 2011-2031*. Kabupaten Blora : BAPPEDA.
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Peraturan No.26 Tahun 2008: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Republik Indonesia.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Presiden Republik Indonesia. 1990. *Keputusan Presiden No 32: Pengelolaan Kawasan Lindung*. Republik Indonesia.